

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, ANGGARAN PENDIDIKAN DAN ANGGARAN
KESEHATAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KARANGASEM**

Made Praba Utami Pramesti¹

I Nyoman Mahaendra Yasa²

I Wayan Wenagama³

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia*

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan suatu daerah. IPM merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. IPM Karangasem menduduki posisi terendah, menyebabkan kesejahteraan masyarakat tergolong rendah yang dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan secara simultan dan parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem dengan data sekunder tahun 2005-2019. Metode pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara parsial pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh paling dominan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Upaya mengatasi rendahnya kesejahteraan masyarakat dapat melalui peningkatan perekonomian daerah, mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD untuk anggaran pendidikan dan minimal 10 persen untuk kesehatan serta peningkatan fasilitas di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga tercipta pembangunan manusia yang optimal.

Kata kunci: *pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, kesejahteraan masyarakat*

Klasifikasi JEL: O47, H52, H51, H53

ABSTRACT

Community welfare is a reflection of the success of the development of an area. HDI is used to measure the welfare of the community. Karangasem's HDI occupies the lowest position, causing welfare to be classified as low which is influenced by factors of economic growth, education and health budget. This study aims to analyze effect of economic growth, education and health budget on welfare of the community in Karangasem using secondary data for 2005-2019. The data collection method used non-participant observation and analyzed with multiple linear regression. Based on the results, the economic growth, education budget and health budget simultaneously have significant effect on the welfare. Partially the economic growth, education budget and health budget have positive and significant effect on welfare of the community. Economic growth has the most dominant influence on the welfare. There needs to be an effort to overcome the low welfare through improving the regional economy, allocating minimum of 20 percent of government budget for the education and a minimum of 10 percent for health

keyword: *economic growth, education budget, health budget, public welfare*

Klasifikasi JEL: O47, H52, H51, H53

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berupaya melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Shrestha & Coxhead, 2018). Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan terpenting dalam pembangunan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan, kemiskinan merupakan kendala yang menghambat manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini juga bisa menjadi pemicu berbagai masalah sosial. Mengingat dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, maka upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan (Permadi, 2018). Ide dasar pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, tidak hanya kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kualitas kehidupan manusia (Olken, 2019)

Paradigma pembangunan adalah suatu proses menyeluruh yang menyentuh seluruh aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lainnya. Pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan, dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat (Dartanto *et al.*, 2020). Kemajuan pembangunan apabila diiringi dengan partisipasi masyarakat yang produktif dapat memajukan perekonomian daerah. Masyarakat diharapkan bukan menjadi obyek pembangunan tetapi dapat menjadi subyek pembangunan agar masyarakat dapat menerima kontribusi yang bermanfaat di suatu wilayah secara makro sehingga dapat memajukan suatu negara (Diba *et al.*, 2020).

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses dimana terdapat keterkaitan antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan tersebut dan dianalisis sehingga diketahui runtutan peristiwa yang akan mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi. Dimensi materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi. Dimensi non materi dapat dilihat dari sisi pendidikan dan kesehatan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat, PBB telah menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan suatu ukuran standar pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: (1) lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; (3) tingkat kehidupan yang layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (Sulistyowati *et al.*, 2017)

Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,92 poin. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Angka ini lebih rendah dari capaian IPM Provinsi Bali yang sedikit lebih tinggi yakni 75,38 poin. IPM Provinsi Bali yang cukup tinggi belum dapat dikatakan cukup baik, seharusnya mampu melebihi provinsi lainnya terkait dengan Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia.

Tabel 1. IPM Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (Poin)

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35
Kab. Tabanan	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16
Kab. Badung	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59
Kab. Gianyar	75,03	75,70	76,09	76,61	77,14
Kab. Klungkung	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71
Kab. Bangli	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35
Kab. Karangasem	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34
Kab. Buleleng	70,03	70,65	71,11	71,70	72,30
Kota Denpasar	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68
Provinsi Bali	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Tabel 1. menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 IPM Provinsi Bali mencapai 73,27 poin dan meningkat sebesar 75,38 poin di tahun 2019. Berdasarkan data di atas, IPM Kabupaten Karangasem merupakan peringkat nomor 9 terendah dari 9 kabupaten/kota yakni hanya sebesar 67,34 poin pada tahun 2019. Angka ini sangat rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Rendahnya IPM di Kabupaten Karangasem menunjukkan ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Salah satu mekanisme untuk mengurangi ketimpangan adalah berupaya meningkatkan modal manusia sehingga dapat meningkatkan pendapatan di masa depan. IPM telah didefinisikan sebagai proses dalam menjalani hidup yang panjang dan sehat untuk dididik dan menikmati standar hidup yang layak. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Kesenjangan kesejahteraan yang terjadi di suatu negara menuntut peran negara untuk terlibat dalam memecahkannya dengan mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi, politik dan bidang lain yang bertujuan untuk melindungi hak, meningkatkan kesejahteraan dan menerapkan keadilan bagi semua rakyat (Aziz, 2019).

Menurut Wenagama (2020), pembangunan manusia sebagai proses partisipatif dan dinamis yang merupakan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam kegiatan pembangunan yang semakin maju, peranan dan kemampuan daerah terus diusahakan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui tiga aspek yaitu usia hidup, pendidikan dan standar hidup layak. Meningkatnya ketiga aspek tersebut, akan ditentukan oleh perkembangan anggaran di bidang kesehatan, anggaran di bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan diketahuinya aspek-aspek yang mempengaruhi kesejahteraan, maka dapat dibuatkan program pengembangan menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk itu

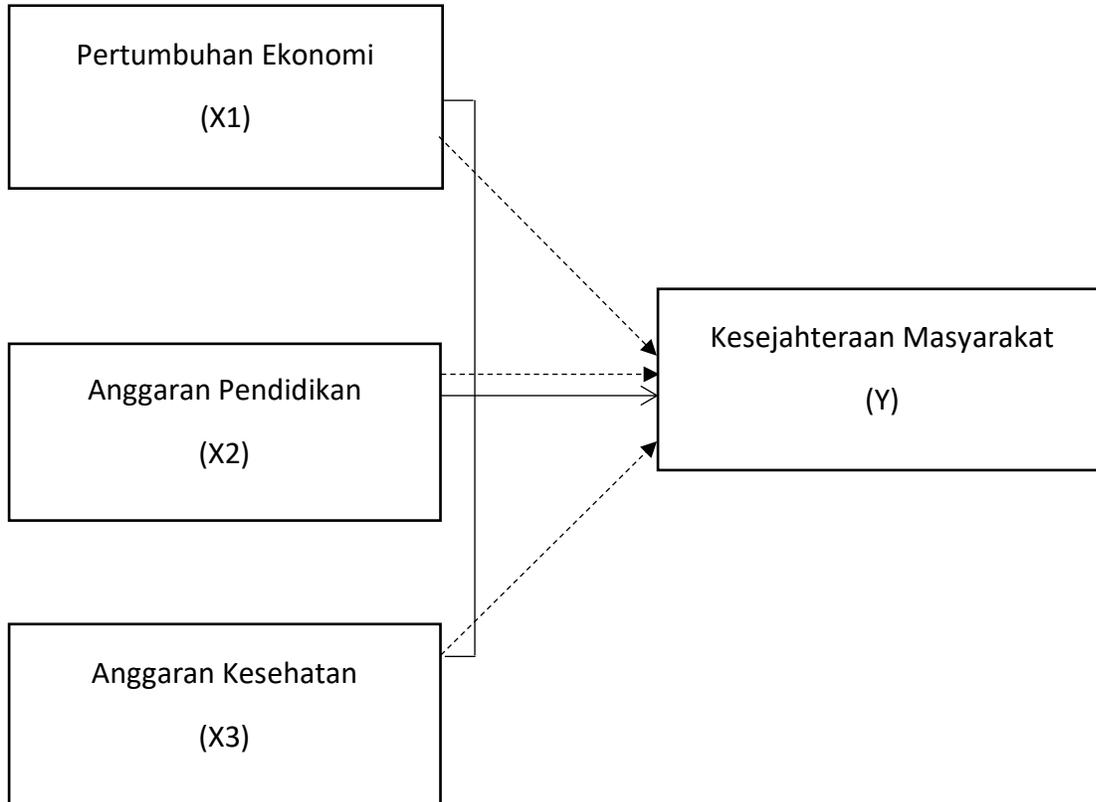
perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Karangasem. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat baik secara taraf hidup, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi, akan menciptakan investasi, membuka lapangan kerja, menyerap angkatan kerja yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan penduduk (Seran, 2017). Berdasarkan penelitian Arief *et al.* (2018), pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanda positif bermakna bahwa kenaikan pada laju pertumbuhan ekonomi akan disertai dengan kenaikan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan penelitian Pratama & Darsana (2016), pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dilihat dari besaran PDRB. Semakin tinggi tingkat PDRB, maka peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan akan meningkat atau terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, adanya peningkatan pada tingkat pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat melalui nilai IPM yang semakin meningkat.

Salah satu faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan penduduk adalah tingkat pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Kebijakan realisasi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (anggaran pendidikan) akan memberi pengaruh yang positif dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Menurut Aditia & Dewi (2018), secara parsial pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan maka akan diikuti oleh perubahan IPM.

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Pengeluaran pemerintah berupa anggaran kesehatan akan membantu membiayai pelatihan tenaga medis dan infrastruktur pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan angka harapan

hidup yang nantinya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian Aditia & Dewi (2018), pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Rahmawati & Nur Intan (2020), pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem

- H1: Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan berpengaruh secara simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem.
- H2: Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan berpengaruh positif secara parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis dengan fenomena yang diselidiki. Berbentuk asosiatif yakni penelitian yang meneliti pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya atau mengetahui hubungan antar satu variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Karangasem dengan 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Sidemen dan Kecamatan Selat. Alasan memilih Kabupaten Karangasem menjadi lokasi dalam penelitian ini karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karangasem menduduki posisi terendah nomor 9 dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem tergolong terendah dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota yang lainnya.

Objek penelitian atau variabel penelitian adalah suatu objek yang sudah ditetapkan oleh peneliti agar dapat dipelajari sehingga memperoleh suatu informasi dari hal tersebut yang nantinya dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 58). Penelitian ini memfokuskan kajian pengaruh tiga variabel utama yaitu pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kesejahteraan Masyarakat (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Pertumbuhan Ekonomi (X1), Anggaran Pendidikan (X2) dan Anggaran Kesehatan (X3).

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperoleh dari BPS Kabupaten Karangasem. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah informasi terkait teori tentang pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan (*Library Research*)

yakni penelitian yang datanya diambil dari kepustakaan yaitu buku, dokumen, artikel, jurnal dan internet terkait dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots \dots \dots (1)$$

Definisi Operasional Variabel

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat yang diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dinyatakan dengan satuan poin.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dalam satu tahun yang diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan ekonomi/PDRB, yang dinyatakan dengan satuan persen.

Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, yang diukur dengan menggunakan realisasi APBD per fungsi pendidikan, yang dinyatakan dengan satuan juta rupiah.

Anggaran Kesehatan merupakan keseluruhan anggaran yang diarahkan pada pemenuhan kesehatan masyarakat umum dan semua hal yang menunjang kesehatan yang diukur dengan menggunakan realisasi APBD per fungsi kesehatan, yang dinyatakan dengan satuan juta rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan suatu daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak berada dalam kondisi yang sejahtera. Pembangunan manusia menjadi sangat penting guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik agar terciptanya sumber daya yang berkualitas.

Untuk mengetahui sejauh mana kesejahteraan masyarakat, maka ditetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai suatu ukuran standar pembangunan manusia. IPM merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari tiga indikator yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi capaian IPM. Maka apabila ketiga indikator tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM juga akan meningkat yang menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Pada tahun 2005, IPM Kabupaten Karangasem sebesar 63,3 poin dan meningkat menjadi sebesar 64,29 poin di tahun 2006. Selanjutnya di tahun 2007 dan 2008 meningkat kembali sebesar 65,11 poin dan 65,46 poin. Peningkatan terus terjadi setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 menjadi IPM tertinggi yakni sebesar 67,34 poin. IPM Kabupaten Karangasem yang terus meningkat menunjukkan pertumbuhan yang positif tetapi rendahnya IPM Kabupaten Karangasem menunjukkan pertumbuhan yang lambat. Berdasarkan angka IPM tersebut dapat dilihat kesejahteraan belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata di setiap kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah, sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka potensi sumber pendapatan

masyarakat semakin besar yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat baik secara taraf hidup, kesehatan dan pendidikan (Kristyanto & Kaluge, 2018). Tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah perolehan atas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat (Suartha & Yasa, 2017). PDRB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa yang diproduksi di daerah atau provinsi dalam waktu tertentu.

Pada tahun 2006 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yaitu 2005, yang semula 5,13 persen menjadi 4,8 persen. Kemudian pada tahun 2007 mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebesar 6,16 persen. Namun, pada tahun 2014 kembali mengalami perlambatan hingga tahun 2019 menjadi 5,5 persen. Persentase laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tahun 2019 merupakan persentase yang tergolong rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa standar hidup layak masyarakat yang dilihat dari persentase pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem tergolong masih rendah.

Sasaran dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan yang merata. Namun terkadang pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang terdistribusi dengan baik sehingga masih terdapat ketimpangan di beberapa wilayah dan belum mampu mencapai kesejahteraan. Berdasarkan persentase laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem merupakan persentase yang tergolong rendah karena kurangnya kemampuan dalam mengakses sumber daya dan faktor-faktor produksi yang tersedia maupun hasil-hasil yang telah dicapai dalam suatu proses pembangunan ekonomi. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menggali potensi sumber daya pada sektor unggulan daerah dan penerapan kebijakan yang tepat sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dianggap lebih mampu bersaing di pasar global dalam memasarkan barang dan jasa yang dihasilkannya sehingga dapat memajukan perekonomian suatu bangsa. Salah satu komponen dalam peningkatan SDM adalah adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Perbaikan kualitas pendidikan membutuhkan peran pemerintah sebagai pelaksana pembangunan melalui penetapan anggaran pendidikan.

Pada tahun 2005 anggaran sebesar 109.835 juta rupiah. Kemudian mengalami peningkatan anggaran hingga tahun 2007 sebesar 185.875 juta rupiah namun menurun pada tahun 2008 menjadi 124.872 juta rupiah. Tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 sebesar 488.924 juta rupiah namun kembali mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 369.711 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2016 hingga 2019 anggaran fungsi pendidikan terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan di Kabupaten Karangasem tergantung dengan jumlah penduduk dan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan.

Besarnya jumlah anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah berbeda-beda seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan sarana dan prasarana beserta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan juga harus ditambah guna meningkatkan kualitas pendidikan yang memadai. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi yang mengatur kebijakan fiskal sangat dibutuhkan dalam menentukan besaran pengeluaran untuk bidang pendidikan guna memperbaiki kualitas SDM.

Pembangunan kesehatan adalah upaya suatu bangsa untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Perbaikan kualitas kesehatan merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan agar dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui penetapan anggaran kesehatan.

Tahun 2005 anggaran kesehatan yang dialokasikan sebesar 22.578 juta rupiah. Kemudian meningkat hingga tahun 2007 sebesar 35.906 juta rupiah. Pada tahun 2008 dan 2009 mengalami peningkatan kembali namun menurun di tahun 2010 menjadi 59.661 juta rupiah. Tahun berikutnya hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan hingga 146.781 juta rupiah dan sempat kembali menurun pada tahun 2015. Namun anggaran kesehatan yang diberikan pada akhirnya terus meningkat hingga tahun 2019 yakni sebesar 280.157 juta rupiah.

Anggaran kesehatan merupakan realisasi anggaran fungsi kesehatan yang digunakan untuk membiayai segala sarana kesehatan seperti obat-obatan, ahli medis yang profesional, kemudahan akses kesehatan, program keluarga berencana dan perbaikan fasilitas kesehatan lainnya. Anggaran kesehatan yang digunakan untuk membiayai program perbaikan kesehatan menjadi sangat penting karena berdampak terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perbaikan kualitas kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terjadi seiring dengan tersedianya fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sama halnya dengan anggaran pendidikan, pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan besarnya pembiayaan yang akan dikeluarkan untuk anggaran kesehatan.

Hasil Penelitian

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi (X_1), anggaran pendidikan (X_2) dan anggaran kesehatan (X_3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Analisis regresi linear berganda diolah dengan bantuan *software* SPSS for Windows 22.0 dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.181	.204		-.887	.394
Pertumbuhan Ekonomi	.437	.155	.487	2.824	.017
Anggaran Pendidikan	.364	.160	.392	2.281	.043
Anggaran Kesehatan	.474	.164	.474	2.884	.015

Sumber: Data Diolah, 2020

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 2 tersebut, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0,181 + 0,437 X_1 + 0,364 X_2 + 0,474 X_3$$

Nilai koefisien regresi variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian ini yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (X_1), anggaran pendidikan (X_2) dan anggaran kesehatan (X_3) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data digunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria jika *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant* yang dipakai yaitu 5 persen, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal namun sebaliknya, jika *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih kecil dari *level of significant* 5 persen, maka dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi tidak normal. Hasil uji normalitas untuk seluruh sampel dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.52645683
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.426
Asymp. Sig. (2-tailed)		.993

Sumber: Data Diolah, 2020

Hasil pengujian pada persamaan regresi linear berganda dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,993 lebih besar dari *level of significant*, yaitu 5 persen (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada model regresi yang di uji sudah berdistribusi normal.

Suatu model regresi jika mengandung gejala autokorelasi, maka prediksi yang dilakukan dengan model tersebut akan tidak baik, atau dapat memberikan hasil prediksi yang menyimpang. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW-test) atau *d* statistik terhadap variabel pengganggu (*disturbance error term*). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.850	.723	.647	.59392340	1.392

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa, nilai DW 1,392, nilai ini bila dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5 persen, jumlah sampel (*n*) 15 dan jumlah variabel independen (*K*=3) maka diperoleh nilai *du* sebesar 1,7501. Nilai DW 1,392 kurang dari batas atas (*du*) yakni 1,7501 dan kurang dari (*4-du*) $4 - 1,7501 = 2,2499$, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak lolos uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson test. Oleh karena nilai autokorelasi pada uji Durbin-Watson test tidak memenuhi kriteria atau tidak lolos uji, maka pilihan kedua dilakukan uji autokorelasi dengan Run Test. Model regresi dikatakan terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* pada uji Run Test memiliki nilai lebih dari 0,05. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value	.03174
Cases < Test Value	7
Cases >= Test Value	8
Total Cases	15
Number of Runs	6
Z	-1.059
Asymp. Sig. (2-tailed)	.290

Sumber: Data Diolah,2020

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 5 menunjukkan bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* pada uji Run Test sebesar 0,290 yang lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar nilai residual.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat dilihat pada nilai *tolerance* dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10 persen atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pertumbuhan Ekonomi	0,848	1,179
Anggaran Pendidikan	0,852	1,174
Anggaran Kesehatan	0,934	1,070

Sumber: Data Diolah,2020

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai VIF dan *tolerance*, dimana diperlihatkan bahwa tidak terdapat nilai *tolerance* yang lebih dari 0,1 (10 persen) ataupun nilai VIF yang tidak lebih dari 10. Oleh karena itu berdasarkan nilai *tolerance* dan VIF pada model analisis tersebut tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser* dengan cara meregresi nilai *absolute residual* dari model yang di estimasi terhadap variabel bebas. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji *Glejser* dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Pertumbuhan Ekonomi	0,454
Anggaran Pendidikan	0,062
Anggaran Kesehatan	0,947

Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi (X_1) sebesar 0,454, anggaran pendidikan (X_2) sebesar 0,062 dan anggaran kesehatan (X_3) sebesar 0,947. Hasil uji tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari $\alpha = 0.05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji F (*F test*) digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan kelayakan model yang dihasilkan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5 persen. Jika nilai signifikansi uji F (*F test*) $< 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya, begitupun sebaliknya. Hasil uji F (*F test*) dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji F (F test)

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.120	3	3.373	9.563	.002
	Residual	3.880	11	.353		
	Total	14.000	14			

Sumber: Data Diolah,2020

Hasil uji F (*F test*) berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 9,563 dengan nilai signifikansi *P value* 0,002 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa ketiga variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti secara simultan pertumbuhan ekonomi (X_1), anggaran pendidikan (X_2) dan anggaran kesehatan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem.

Pengujian pengaruh secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen digunakan uji t. Adapun hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji t (Uji Hipotesis)

Variabel	Koefisien Regresi (B)	Nilai t hitung	Sig.
Pertumbuhan Ekonomi (X_1) → Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0,437	2,824	0,017
Anggaran Pendidikan (X_2) → Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0,364	2,281	0,043
Anggaran Kesehatan (X_3) → Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0,474	2,884	0,015

Sumber: Data Diolah,2020

Hasil perhitungan uji t pada Tabel 9 tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi X_1 atau pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,437 dengan nilai t-hitung yaitu 2,824 bernilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$, berarti jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 persen, maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat sebesar 0,437 poin. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka hipotesis pertama diterima. Nilai koefisien regresi X_2 atau anggaran pendidikan adalah sebesar 0,364 dengan nilai t-hitung yaitu 2,281 bernilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$, berarti jika anggaran pendidikan meningkat sebesar 1 juta rupiah, maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat sebesar 0,364 poin, anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka hipotesis kedua diterima. Nilai anggaran kesehatan adalah sebesar 0,474 dengan nilai t-hitung yaitu 2,884 bernilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$, berarti jika anggaran kesehatan meningkat sebesar 1 juta rupiah, maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat sebesar 0,474 poin, anggaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka hipotesis ketiga diterima.

Tabel 10. Hasil Uji Signifikansi Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,850 ^a	0,723	0,647	0,59392340

Sumber: Data Diolah, 2020

Hasil uji pada Tabel 10 memberikan hasil dimana diperoleh besarnya nilai R^2 adalah sebesar 0,723. Ini berarti sebesar 72,3 persen variasi perubahan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variasi perubahan variabel pertumbuhan ekonomi (X_1), anggaran pendidikan (X_2) dan anggaran kesehatan (X_3), sedangkan sisanya sebesar 27,7 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Hasil nilai terbesar *standardized coefficients beta* pada Tabel 11 diperoleh pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.487. Dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh paling dominan pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem.

Tabel 11. Hasil Uji Signifikansi Koefisien Standardized Coefficients Beta

Variabel	Nilai <i>Standardized Coefficients Beta</i>
Pertumbuhan Ekonomi	.487
Anggaran Pendidikan	.392
Anggaran Kesehatan	.474

Sumber: Data Diolah, 2020

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan secara simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai nilai F-hitung sebesar 9,563 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.002 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H_1 diterima. Hasil ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ketika pemerintah mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk sektor lain seperti infrastruktur, maka akan meningkatkan prasarana fisik sehingga memacu terjadinya investasi ekonomi yang selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena banyak modal yang tersedia untuk pembangunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berarti terjadi peningkatan kapasitas produksi perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat bertambah sehingga taraf hidup masyarakat meningkat (Aditia & Dewi, 2018).

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditia & Dewi (2018), bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia dapat menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat terus-menerus bertambah yang mendorong masyarakat sejahtera.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,437 bernilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H_1 diterima. Hasil ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya tingkat PDRB tetapi juga dilihat dari sejauh mana pembangunan dapat diterjemahkan ke dalam beberapa aspek sehingga muncul suatu kondisi masyarakat sejahtera (Aditia & Dewi, 2018). Sarana dan prasarana sektor publik sangat dibutuhkan untuk mendorong masyarakat dalam memajukan pembangunan dan menggerakkan perekonomian. Apabila pertumbuhan ekonomi di suatu daerah meningkat, maka pendapatan per kapita juga akan meningkat. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Aslan *et al.* (2019), proses kecepatan ekonomi suatu daerah ditunjukkan menggunakan tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka potensi sumber pendapatannya semakin besar. Peningkatan yang terjadi akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Daud (2017), menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Kurniasih (2017) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang sama dilakukan oleh Neumann (2020), menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah melalui penerapan instrumen kebijakan (baik belanja langsung maupun tidak langsung), dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan (Taher & Tuasela, 2019)

Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh anggaran pendidikan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,364 bernilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$

mengindikasikan bahwa H_2 diterima. Hasil ini berarti bahwa anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Anggaran pendidikan akan membantu memenuhi kebutuhan akan fasilitas pendidikan sehingga memudahkan akses masyarakat dalam mengenyam pendidikan, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah, maka pengetahuan dan keterampilan masyarakat juga meningkat sehingga masyarakat dapat memperoleh pekerjaan, alhasil terjadi peningkatan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah daerah Kabupaten Karangasem hendak memenuhi aturan UU Nomor 20 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari APBD.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tersedianya SDM yang berkualitas. Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa keunggulan suatu bangsa dalam berbagai bidang tidak semata-mata hanya pada keunggulan sumber daya alam yang dimiliki, melainkan kualitas SDM yang mampu mengolah dan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahari & Sudirman (2017), pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap indeks kualitas manusia. Hubungan positif dan signifikan antara variabel pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan terhadap indeks kualitas manusia menggambarkan bahwa anggaran pendidikan mampu meningkatkan kualitas manusia. Sejalan dengan hasil penelitian Wirasastri *et al.* (2020), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengaruh Anggaran Kesehatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh anggaran kesehatan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,474 bernilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$

mengindikasikan bahwa H_3 diterima. Hasil ini berarti bahwa anggaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Status kesehatan yang baik merupakan jaminan bagi masyarakat dapat melakukan semua aktifitas hidupnya. Kebutuhan dasar manusia akan kesehatan meliputi perbaikan gizi dan pelayanan kesehatan yang merupakan hak tiap warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur dengan baik dalam peningkatan kesehatan masyarakat adalah pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah hendak mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dana kesehatan dialokasikan minimal 10 persen dari APBD. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan menjadi faktor penting dalam penurunan angka kematian bayi dan anak serta peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). Dengan meningkatnya AHH, maka semakin banyak masyarakat yang sehat secara fisik dan mental sehingga lebih produktif.

Sejalan dengan hasil penelitian oleh Piabuo & Tieguhong (2017), pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kualitas manusia. Hubungan positif dan signifikan antara variabel pembiayaan pemerintah di sektor kesehatan terhadap indeks kualitas manusia menunjukkan bahwa anggaran pemerintah di sektor kesehatan mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas manusia dengan peningkatan anggaran kesehatan, maka fasilitas kesehatan yang tersedia juga mengalami peningkatan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Raghupathi & Raghupathi (2020), kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Ketika produktivitas meningkat maka kemampuan untuk memperoleh barang dan jasa akan terpenuhi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Variabel yang dominan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem

Hasil nilai terbesar *standardized coefficients beta* diperoleh pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.487. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh paling dominan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem.

Kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih terfokus pada program sasaran khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja serta memperluas pasar untuk produk-produk lokal sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan prioritas perhatian pemerintah daerah dengan indeks pembangunan manusia yang rendah. Perwujudan *good governace* dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai mitra dalam pelaksanaan pembangunan serta transparansi di bidang pemerintahan (Wiriana & Kartika, 2020). Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat baik secara taraf hidup, kesehatan dan pendidikan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong meningkatnya pembangunan melalui pembiayaan yang dialokasikan ke dalam sektor-sektor publik yang dapat menunjang peningkatan kualitas modal manusia seperti bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong terciptanya infrastruktur yang menjadi pemicu banyaknya industri, penyediaan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit yang akan mendorong tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Anggaran pendidikan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan anggaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan yang diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tiga indikator yang dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang tentunya di dukung oleh tingkat pendidikan maupun tingkat kesehatan, dimana terciptanya sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas sehingga masyarakat lebih produktif dan bertambahnya pendapatan yang dimiliki, hal ini akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan maka implikasi yang dapat dimanfaatkan adalah penyusunan dan pengalokasian anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia guna menciptakan masyarakat yang sejahtera dapat dilakukan melalui perbaikan pelayanan maupun penyediaan fasilitas di bidang pendidikan dan kesehatan serta penerapan kebijakan fiskal dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi menuju ke arah yang lebih baik kedepannya. Kewenangan pemerintah daerah melalui adanya penerapan kebijakan-kebijakan, pembuatan strategi dan perencanaan pembangunan yang tepat dengan memperhatikan sektor-sektor potensial dapat memajukan pembangunan dan menggerakkan perekonomian sehingga tercipta masyarakat sejahtera.

SIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh paling dominan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menetapkan kebijakan fiskal terutama pada sektor belanja modal pemerintah agar penggunaannya lebih diarahkan sesuai dengan potensi ekonomi dan sektor unggulan daerah guna membiayai sektor publik khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sehingga mampu memajukan perekonomian.

Saran

Pemerintah hendak terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan meningkat, peningkatan pendapatan yang terjadi pada masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehingga

nantinya dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengalokasikan anggaran pendidikan agar tepat sasaran. Anggaran pendidikan yang dialokasikan minimal 20 persen dari APBD melalui penyediaan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, tenaga pengajar dan akuntabilitas dana bos yang dikeluarkan khususnya bagi keluarga miskin sangat penting dalam meningkatkan tingkat partisipasi sekolah dan memberantas buta huruf sehingga pengembangan sumber daya manusia semakin luas dan berkualitas. Peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan alokasi anggaran kesehatan juga perlu diperhatikan agar sesuai kebutuhan daerah. Anggaran kesehatan yang dialokasikan minimal 10 persen dari APBD melalui penyediaan fasilitas kesehatan seperti adanya Rumah Sakit Umum (RSU) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta kemudahan dalam mengakses kesehatan dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) dan memperlancar segala aspek kegiatan ekonomi sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Aditia, N. M. A., & Dewi, N. P. M. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(2), 212–242.
- Arief, S., Ujianto, & Mashudi, D. (2018). Sustainability Economic And Economic Growth: The Moderating Effect Of Disparity Region And Income On Society Welfare. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 6(5), 300–320. <https://doi.org/https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i5.2018.1453>
- Aslan, A., Darma, D. C., & Wijaya, A. (2019). Have Village Funds Impact Growth Economy and Poverty Rate. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(10), 2601–2605.
- Aziz, A. (2019). Urgency of Fiscal Policy to Overcome Welfare Gap in Indonesia. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 11(1), 90–109.
- Dartanto, T., Moeis, F. R., & Otsubo, S. (2020). Intragenerational Economic Mobility in Indonesia: A Transition from Poverty to the Middle Class in 1993–2014. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 193–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1657795>
- Daud, N. (2017). The Effect of Sector Economic Growth on the Performance of Employment and

- Welfare of People. *International Journal of Business and Management*, 12(9), 194.
<https://doi.org/10.5539/ijbm.v12n9p194>
- Diba, A. F. O., Fathorrazi, M., & Somaji., R. P. (2020). Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Ekuilibrium*, 2(1), 10–19.
- Kristyanto, V. S., & Kaluge, D. (2018). Peningkatan Inklusivitas Ekonomi Melalui Pembiayaan Investasi Modal Manusia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 182–189.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JEKT.2018.v11.i02.p04>
- Kurniasih, E. P. (2017). Effect of economic growth on income inequality, labor absorption, and welfare in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 181–188.
<https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art7>
- Neumann, T. (2020). The impact of entrepreneurship on economic, social and environmental welfare and its determinants: a systematic review. *Management Review Quarterly*, 1(1), 1–32. <https://doi.org/10.1007/s11301-020-00193-7>
- Olken, B. A. (2019). Designing Anti-Poverty Programs in Emerging Economies in the 21st Century: Lessons from Indonesia for the World. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 319–339. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690411>
- Permadi, Y. A. (2018). Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 216–233.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JEKT.2018.v11.i02.p08>
- Piabuo, S. M., & Tieguhong, J. C. (2017). Health expenditure and economic growth - a review of the literature and an analysis between the economic community for central African states (CEMAC) and selected African countries. *Health Econ Rev*, 7(23), 1–10.
<https://doi.org/10.1186/s13561-017-0159-1>
- Pratama, A. G. K., & Darsana, I. B. (2016). Pengaruh Kemiskinan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *E-Jurnal EP Unud*, 8(6), 1300–1330.
- Raghupathi, V., & Raghupathi, W. (2020). Healthcare Expenditure and Economic Performance: Insights From the United States Data. *Front Public Health.*, 8(1), 156.
<https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00156>
- Rahmawati, F., & Nur Intan, M. (2020). Government Spending, Gross Domestic Product, Human Development Index (Evidence from East Java Province). *KnE Social Sciences*, 1(1), 774–786.
<https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6641>
- Seran, S. (2017). Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1), 59–71.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i01.p07>

Shrestha, R., & Coxhead, I. (2018). Can Indonesia Secure a Development Dividend from Its Resource Export Boom? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1458702>

Suartha, N., & Yasa, I. G. W. M. (2017). Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1), 95–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i01.p10>

Sulistiyowati, N., Sinaga, B. M., & Novindra. (2017). Impacts of Government and Household Expenditure on Human Development Index. *Journal of Economics and Policy*, 10(2), 412–428.

Taher, S., & Tuasela, A. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 3(2), 40–58.

Wenagama, W. (2020). Analisis Pengerluaran Rumah Tangga Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan dan, Adat di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 13(2), 331–345. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JEKT.2020.v13.i02.p09>

Wirasastri, I., Idris, & Sofyan, E. (2020). Analysis of the Impact of Labor, Governments Expenditure Per Capita, Be Literate (Education) and Life Expectancy (Health) on Human Development In Jambi Province. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 152(1), 72–77. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.010>

Wiriana, G. I., & Kartika, I. N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2012-2018. *E-Jurnal EP Unud*, 9(5), 1051–1081.

Zahari, M. M., & Sudirman, A. (2017). The Effect of Government Expenditures in Education and Health against Human Development Index in Jambi Province. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 4(8), 3823–3829. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v4i8.21>